



KOMUNIKASI SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN: ANALISIS WACANA KRITIS ATAS IDEOLOGI DAN DOMINASI DALAM KONFLIK AMERIKA SERIKAT-IRAN

Muhammad Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

muhammad4004253005@uinsu.ac.id

Rubino

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

rubino@uinsu.ac.id

Received: 04 Juli 2026

Accepted: 03 September 2026

Published: 10 September 2026

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa komunikasi resmi dalam konflik Amerika Serikat-Iran tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga membentuk legitimasi, ideologi, dan batas tindakan yang dianggap sah. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana kedua negara merepresentasikan diri dan lawan, membingkai ancaman, hukum, perdamaian, serta tindakan koersif selama periode Januari 2020-Juni 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana kritis komparatif terhadap dua puluh dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga kepresidenan dan kementerian luar negeri Amerika Serikat dan Iran. Analisis dilakukan melalui representasi aktor, polarisasi moral, modalitas, strategi legitimasi, serta pembacaan tematik secara longitudinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana Amerika Serikat secara konsisten membingkai Iran sebagai ancaman terorisme, nuklir, dan ketidakstabilan regional, sementara tekanan ekonomi dan penggunaan kekuatan diposisikan sebagai tindakan perlindungan dan jalan menuju perdamaian. Sebaliknya, wacana Iran membingkai Amerika Serikat sebagai agresor unilateral dan pelanggar hukum internasional, sedangkan Iran dikonstruksi sebagai negara berdaulat yang melakukan perlawanan dan pembelaan diri. Temuan memperlihatkan adanya pola legitimasi cermin, yaitu penggunaan struktur argumentasi serupa untuk menghasilkan penilaian moral yang berlawanan.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Kekuasaan, Ideologi, Analisis Wacana Kritis, Legitimasi, Amerika Serikat-Iran



Abstract

This study addresses the problem that official communication in the United States–Iran conflict does not merely convey policy but also constructs legitimacy, ideology, and the boundaries of actions considered acceptable. It aims to analyze how the two states represent themselves and their opponents, frame threats, law, peace, and coercive actions during the period from January 2020 to June 2026. The study employs a qualitative approach using comparative critical discourse analysis of twenty official documents issued by presidential and foreign affairs institutions in the United States and Iran. The analysis focuses on actor representation, moral polarization, modality, legitimation strategies, and longitudinal thematic reading. The findings show that United States discourse consistently portrays Iran as a source of terrorism, nuclear danger, and regional instability, while economic pressure and the use of force are framed as protective measures and pathways to peace. In contrast, Iranian discourse portrays the United States as a unilateral aggressor and violator of international law, while Iran is constructed as a sovereign state engaged in resistance and self-defense. The findings reveal a pattern of mirror legitimation, in which similar argumentative structures are used to produce opposing moral judgments.

Keywords: Political Communication, Power, Ideology, Critical Discourse Analysis, Legitimation, United States-Iran

PENDAHULUAN

Konflik Amerika Serikat-Iran merupakan salah satu arena geopolitik yang menunjukkan bahwa komunikasi resmi negara dapat bekerja sekaligus sebagai penyampai kebijakan dan instrumen kekuasaan. Sejak pembunuhan Qasem Soleimani pada Januari 2020, hubungan kedua negara terus dibentuk oleh sanksi ekonomi, sengketa program nuklir, aktivitas kelompok proksi, keamanan pelayaran, ancaman penggunaan kekuatan, serta perdebatan mengenai legitimasi hukum internasional. Dalam periode 2020–2026, bahasa resmi juga bergerak dari diplomasi institusional menuju komunikasi yang lebih langsung, cepat, dan termiliterisasi, terutama melalui istilah seperti *maximum pressure*, pembelaan diri, hak nuklir damai, agresi, dan perdamaian melalui kekuatan. Situasi ini krusial karena pemilihan bahasa menentukan siapa yang diposisikan sebagai ancaman, korban, pelindung, atau pelanggar hukum, sehingga dapat memengaruhi penerimaan publik terhadap tindakan koersif. Secara akademik, fenomena tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara komunikasi, ideologi, legitimasi, dan dominasi. Secara praktis, kegagalan memahami konstruksi naratif dapat memperbesar salah persepsi, mengurangi ruang diplomasi, dan bahkan memperkuat efek politik sanksi yang tidak selalu sesuai dengan tujuan awalnya (Pesaran, 2026).

Penelitian terdahulu telah membahas konflik Amerika Serikat-Iran melalui beberapa jalur utama, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana teks resmi kedua negara saling membentuk legitimasi. Studi mengenai sanksi menyoroti dampak ekonomi, dimensi retributif, stigma, dan ketahanan negara sasaran (Abdi, 2025), sedangkan kajian keamanan



menelaah strategi nuklir, pencegahan, dan risiko serangan preventif (Eslami, 2024a). Penelitian komunikasi telah mengkaji representasi media, narasi strategis, serta polarisasi digital (Alibigloo & Alipoor, 2025). Akdoğan & Adigüzel (2022) bahkan menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menggunakan narasi strategis untuk melegitimasi kebijakan *maximum pressure* terhadap program nuklir Iran. Namun, sebagian besar studi berfokus pada satu medium, satu aktor, satu peristiwa, atau periode yang relatif pendek. Keterbatasan lainnya ialah komunikasi resmi sering diperlakukan sebagai sumber informasi kebijakan, bukan sebagai arena tempat kategori ancaman, legalitas, identitas, dan perdamaian diproduksi secara relasional. Karena itu, perbandingan longitudinal terhadap dokumen resmi Amerika Serikat dan Iran masih diperlukan.

Penelitian ini bertujuan merespons kekurangan tersebut dengan menganalisis komunikasi resmi Amerika Serikat dan Iran secara komparatif dan longitudinal sepanjang Januari 2020-Juni 2026. Berbeda dari penelitian yang berpusat pada pemberitaan media atau percakapan pengguna digital, tulisan ini menempatkan institusi negara sebagai produsen awal kategori politik yang kemudian dapat direproduksi oleh media dan ruang publik. Dua puluh dokumen resmi, masing-masing sepuluh dari Amerika Serikat dan Iran, dibaca melalui analisis wacana kritis dengan perhatian pada representasi aktor, polarisasi moral, modalitas, penghilangan agen, rujukan hukum, dan strategi legitimasi. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga masalah yaitu bagaimana kedua negara merepresentasikan diri, lawan, dan masyarakat yang terdampak, strategi kebahasaan apa yang digunakan untuk membenarkan sanksi, program nuklir, operasi militer, perlawanan, dan negosiasi, serta bagaimana pola tersebut berubah dalam beberapa fase eskalasi. Pendekatan ini memperluas studi narasi strategis yang telah menunjukkan bahwa bahasa diplomatik dan media mengorganisasi persepsi mengenai identitas serta tanggung jawab (Norton & Cooley, 2025), sekaligus menguji bagaimana klaim kebijakan dinormalisasi sebagai tindakan yang dianggap sah.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa semakin kuat komunikasi resmi membingkai pihak lawan sebagai sumber tunggal ancaman, agresi, atau pelanggaran hukum melalui modalitas tinggi dan oposisi moral “kami dengan mereka”, semakin besar pula legitimasi diskursif bagi tindakan koersif pihak sendiri, baik berupa sanksi, tekanan, operasi militer, maupun perlawanan. Sebaliknya, ketika tindakan sendiri dinarasikan sebagai perlindungan, pembelaan diri, kedaulatan, atau jalan menuju perdamaian, tanggung jawab atas eskalasi cenderung dialihkan kepada lawan. Hipotesis interpretatif ini berangkat dari temuan bahwa sanksi dan tekanan tidak hanya menghasilkan dampak material, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas politik dan narasi perlawanan di negara sasaran (RezaeeDaryakenari et al., 2025). Penelitian ini selanjutnya mengajukan konsep “legitimasi cermin” yaitu Amerika Serikat dan Iran diperkirakan menggunakan struktur



argumentasi moral yang serupa dengan keamanan, hukum, perdamaian, dan perlindungan rakyat untuk menghasilkan kesimpulan politik yang berlawanan. Dengan demikian, dominasi komunikasi tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan material lebih besar, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing aktor menentukan istilah, urutan sebab-akibat, dan batas tindakan yang dapat diterima sebagai sah.

LANDASAN TEORI

Landasan teori penelitian ini berangkat dari hubungan antara komunikasi politik, ideologi, legitimasi, dan dominasi dalam konflik antarnegara. Literatur menunjukkan bahwa komunikasi negara tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membingkai aktor, menentukan sumber ancaman, membangun identitas “kami dan mereka”, serta menyediakan alasan moral dan legal bagi tindakan tertentu. Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian yang relevan dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, studi sanksi, stigmatisasi, dan politik identitas menelaah bagaimana tekanan ekonomi, klasifikasi sebagai negara “bermasalah”, emosi, serta respons kontra-stigma membentuk identitas dan perilaku politik Iran (Beidollahkhani, 2022a). Kedua, studi keamanan dan nuklir berfokus pada *deterrence*, nonproliferasi, legalitas, serta risiko serangan preventif (Egeland, 2021a; Eisenstadt, 2025a; Eslami, 2024b). Ketiga, studi komunikasi dan wacana menelaah representasi media, narasi strategis, polarisasi digital, serta konstruksi legitimasi melalui bahasa (Kermani & Hooman, 2024; Kermani & Tafreshi, 2023). Peta ini menunjukkan bahwa hubungan kebijakan dan komunikasi telah banyak dikaji, tetapi integrasi antaraspek tersebut masih terbatas.

Kecenderungan pertama menempatkan sanksi, stigma internasional, politik identitas, dan ketahanan politik sebagai pusat analisis. Orientasi tematisnya adalah bagaimana tekanan ekonomi dan simbolik dari luar menghasilkan konsekuensi material sekaligus identitas bagi negara sasaran. Ylldiz (2021) menunjukkan bahwa sanksi terhadap Iran bekerja melalui pengaturan komoditas dan mata uang, sedangkan Abdi (2025) menyoroti konsekuensi politik-ekonomi sanksi yang tidak terdistribusi secara netral. Altıparmak dan Altıparmak & Thies (2026) memperluas pendekatan tersebut dengan menunjukkan dimensi retributif dan emosional di balik kebijakan sanksi. Pesaran (2026) dan (Dinler, 2026a) memusatkan perhatian pada stigmatisasi, penolakan stigma, dan kekuatan simbolik, sementara Beidollahkhani (2022), Kermani (2022), serta Ranji & Selvik (2026) menunjukkan bahwa identitas, populisme, emosi, dan legitimasi juga menjadi bagian dari pembentukan respons politik Iran. Secara konseptual, studi-studi ini melihat tekanan eksternal bukan hanya sebagai instrumen koersif, tetapi juga sebagai praktik klasifikasi yang membentuk posisi “insider” dan “outsider”. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan tekanan material dan identitas, tetapi sebagian besar penelitian



lebih menekankan dampak kebijakan atau respons negara daripada struktur bahasa resmi yang membuat tekanan tampak sah, perlu, atau tidak terhindarkan.

Kecenderungan kedua berorientasi pada keamanan, program nuklir, *deterrence*, dan legalitas penggunaan tekanan atau kekuatan. Fokus utamanya adalah bagaimana tindakan Amerika Serikat maupun Iran dipahami melalui kerangka ancaman, pencegahan, nonproliferasi, pembelaan diri, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Egeland (2021) membahas ideologi tatanan nuklir, sedangkan Valerio Jovan (2021) menelaah penarikan Amerika Serikat dari pembatasan program nuklir Iran dalam kerangka hukum internasional. Eslami (2024) memetakan faktor pendorong strategi *deterrence* nuklir Iran, sementara Eisenstadt (2025) menilai risiko dan manfaat serangan preventif terhadap Iran. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa ancaman keamanan bukan sekadar fakta objektif, melainkan selalu dipersepsikan melalui kalkulasi risiko, ketidakpastian, dan asumsi mengenai niat lawan. Dalam studi wacana politik yang lebih luas, konstruksi ancaman juga terbukti menjadi perangkat legitimasi yang efektif karena mendekatkan bahaya kepada audiens dan membenarkan tindakan luar biasa (Cap, 2025). Namun, kajian keamanan cenderung memprioritaskan strategi, kapasitas, dan legalitas, sementara cara bahasa resmi menyusun urutan sebab, akibat dan mendistribusikan tanggung jawab atas eskalasi belum selalu dianalisis secara mendalam.

Kecenderungan ketiga memusatkan perhatian pada komunikasi politik, narasi strategis, representasi media, dan analisis wacana kritis. Norton & Cooley (2025) menunjukkan bahwa media Iran dan Amerika Serikat membangun identitas dan tanggung jawab secara berbeda dalam pemberitaan tentang kesepakatan nuklir, sedangkan Alibigloo & Alipoor (2025) memperlihatkan perbedaan representasi konflik melalui bingkai media. Kajian Kermani et al (2023) dan Kermani (2025) mengembangkan orientasi digital dengan menganalisis aktivisme diskursif, jaringan, serta pembingkaiannya di ruang media sosial. Di luar kasus Iran, Simon et al (2023) memperlihatkan melalui analisis wacana kritis bahwa bahasa pemerintah dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi dalam komunikasi krisis. Goulding & Liu (2025) juga menunjukkan bahwa legitimasi konflik dibangun melalui *moralization*, *authorization*, dan *rationalization*, sedangkan Kebede & Pohjonen (2025) menegaskan peran narasi strategis dalam membentuk persepsi, memobilisasi dukungan, dan menolak tekanan eksternal. Secara metodologis, kecenderungan ini menggunakan analisis wacana, analisis naratif, analisis tematik, dan analisis digital. Kekuatan utamanya adalah menjelaskan bagaimana bahasa menghasilkan realitas politik, tetapi objek yang dikaji sering berupa media atau platform digital, bukan pasangan dokumen institusional resmi yang saling merespons.

Ketiga kecenderungan tersebut memberikan fondasi penting, tetapi masih “melupakan” hubungan relasional antara bahasa resmi kedua pihak yang berkonflik. Studi



sanksi menjelaskan dampak ekonomi, stigma, emosi, dan kontra-stigma, tetapi belum secara sistematis menghubungkan proses itu dengan pilihan kebahasaan yang menghasilkan legitimasi Altiparmak & Thies (2026). Studi keamanan menjelaskan *deterrence*, nuklir, legalitas, dan risiko strategis, tetapi sering memperlakukan kategori seperti ancaman, pembelaan diri, atau pencegahan sebagai konsep kebijakan tanpa membedah bagaimana kategori tersebut dibangun dalam teks. Sementara itu, studi komunikasi telah menguraikan representasi media, narasi strategis, dan polarisasi digital, namun sebagian besar berfokus pada satu medium, satu peristiwa, satu aktor, atau periode yang relatif pendek (Kermani, 2025). Bahkan kajian legitimasi konflik yang lebih baru memperlihatkan kekuatan *moralization*, *authorization*, *rationalization*, dan *threat construction*, tetapi belum membandingkan secara longitudinal dua negara yang secara simultan menggunakan bahasa serupa untuk menghasilkan posisi moral yang bertentangan (Cap, 2025). Kekosongan inilah yang menjadi ruang kebaruan penelitian.

Atas dasar kekurangan tersebut, penelitian ini mengarahkan landasan teori pada integrasi analisis wacana kritis, narasi strategis, dan legitimasi untuk menjelaskan hubungan antara komunikasi, ideologi, serta dominasi dalam konflik Amerika Serikat-Iran. Bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan kepentingan, tetapi juga menyusun identitas aktor, menetapkan sumber ancaman, mengurutkan sebab dan akibat, dan menentukan tindakan yang dianggap sah. Analisis diarahkan pada empat perangkat utama, yaitu representasi aktor, polarisasi moral “kami dan mereka”, modalitas, dan strategi legitimasi, serta diperluas dengan pembacaan atas penghilangan agen, rujukan hukum, dan tujuan komunikasi. Orientasi baru penelitian ini adalah memperlakukan dokumen resmi Amerika Serikat dan Iran sebagai pasangan wacana yang saling merespons secara sinkronis dan diakronis sepanjang 2020-2026. Dari kerangka tersebut dirumuskan konsep “legitimasi cermin”, yakni pola ketika dua pihak menggunakan nilai yang sama dengan keamanan, hukum, perdamaian, kedaulatan, dan perlindungan rakyat untuk melegitimasi tindakan sendiri sekaligus mendelegitimasi lawan. Konsep ini tidak mengasumsikan kesetaraan kapasitas atau tanggung jawab material, melainkan menguji kesamaan struktur argumentasi yang menghasilkan penilaian moral berlawanan.



METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak komunikasi institusional berupa dokumen resmi yang diproduksi oleh lembaga negara Amerika Serikat dan Iran selama konflik bilateral Januari 2020-Juni 2026. Fokus analisis tidak diarahkan pada individu sebagai subjek psikologis, organisasi sebagai struktur administratif, ataupun audiens sebagai penerima pesan, melainkan pada teks institusional sebagai praktik komunikasi politik yang membentuk representasi aktor, ancaman, legalitas, perdamaian, dan tindakan koersif. Unit korpus terdiri atas dua puluh dokumen resmi, masing-masing sepuluh dokumen Amerika Serikat dan sepuluh dokumen Iran, yang mewakili beberapa fase konflik: pembunuhan Qasem Soleimani, kebijakan *maximum pressure*, sanksi minyak dan program rudal, dinamika program nuklir, negosiasi, operasi militer, serta gencatan senjata. Setiap dokumen diperlakukan sebagai unit analisis utama, sedangkan kalimat, klausa, frasa, dan pilihan leksikal menjadi unit pengodean untuk membaca mekanisme wacana secara mikro. Pembatasan unit ini memungkinkan penelitian menghubungkan struktur bahasa dengan konteks kebijakan secara sistematis, sekaligus menjaga kedalaman interpretasi atas korpus yang terbatas dan terdefinisi jelas (Hennink & Kaiser, 2022).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana kritis komparatif dan logika studi kasus terikat. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur pengaruh pesan terhadap audiens atau menguji hubungan statistik, melainkan menjelaskan bagaimana bahasa resmi mengatur identitas, sebab, tanggung jawab, legitimasi, dan tindakan yang dianggap sah. Desain komparatif diterapkan pada dua tingkat. Secara sinkronis, dokumen Amerika Serikat dan Iran pada fase konflik yang sama dibandingkan untuk melihat oposisi bingkai, strategi legitimasi, dan distribusi tanggung jawab. Secara diakronis, dokumen setiap negara ditelusuri dari 2020 sampai 2026 untuk mengidentifikasi kesinambungan maupun perubahan kosakata, modalitas, dan konstruksi ancaman. Analisis wacana kritis dipadukan dengan analisis tematik refleksif agar temuan kebahasaan pada tingkat mikro dapat diorganisasi menjadi tema kebijakan yang lebih luas tanpa menghilangkan konteks institusional (Kiger & Varpio, 2020). Desain ini juga menempatkan reflektivitas peneliti sebagai bagian dari proses interpretasi, sesuai karakter penelitian kualitatif yang bersifat kontekstual, sistematis, dan iteratif (Ravitch & Carl, 2021).

Sumber data utama penelitian berupa data sekunder berbentuk teks resmi pemerintah yang tersedia secara terbuka pada laman institusional Amerika Serikat dan Iran. Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan lima kriteria yaitu diterbitkan melalui domain resmi pemerintah, merepresentasikan posisi institusional, bukan komentar individual di media sosial, menyebut secara eksplisit negara lawan atau kebijakan yang berkaitan langsung, menyediakan teks penuh berbahasa Inggris dan mewakili salah satu fase konflik yang telah



ditetapkan. Korpus Amerika Serikat mencakup pernyataan tentang Soleimani, pidato mengenai Iran, sanksi minyak dan program rudal, pemulihan kebijakan *maximum pressure*, pernyataan mengenai serangan, operasi, serta gencatan senjata. Korpus Iran mencakup respons terhadap pembunuhan Soleimani, pernyataan mengenai sanksi pada masa pandemi, pidato di Dewan Keamanan, posisi mengenai kesepakatan nuklir dan Badan Tenaga Atom Internasional, negosiasi, hak nuklir damai, dan pelanggaran gencatan senjata. Artikel jurnal digunakan sebagai data pendukung untuk konteks historis dan dialog teoretis, bukan sebagai korpus utama. Pemilihan purposif ini mengikuti prinsip bahwa kecukupan data kualitatif ditentukan oleh tujuan, heterogenitas, dan kedalaman informasi, bukan oleh angka universal (Hennink & Kaiser, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap arsip resmi dan berlangsung dalam empat tahap. Pertama, peneliti menyusun daftar peristiwa kunci konflik, kemudian menelusuri situs pemerintah dengan kombinasi kata kunci *Iran, United States, sanctions, nuclear, Soleimani, attack, negotiations*, dan *ceasefire*. Kedua, dokumen yang memenuhi kriteria inklusi diunduh atau disalin ke lembar korpus dan diberi kode U01–U10 untuk Amerika Serikat serta I01–I10 untuk Iran; tanggal publikasi, institusi penerbit, isu utama, dan alamat sumber juga dicatat. Ketiga, teks dibersihkan dari menu navigasi, keterangan teknis, dan duplikasi, tetapi judul, ejaan, tanda baca, serta urutan paragraf dipertahankan untuk menjaga integritas konteks. Keempat, peneliti melakukan pembacaan berulang sambil menandai segmen yang memuat penamaan aktor, atribusi kesalahan, klaim legalitas, tujuan keamanan, syarat perdamaian, ancaman, dan janji tindakan. Instrumen penelitian terdiri atas lembar dokumentasi, buku kode, definisi operasional, contoh pengodean, dan memo analitis. Prosedur tersebut sejalan dengan prinsip pengodean kualitatif yang menuntut dokumentasi sistematis, jejak keputusan, dan pengembangan kode secara reflektif (Saldana, 2025).

Analisis data dilakukan melalui enam tahap yaitu familiarisasi, pengodean awal, pengelompokan kode, peninjauan tema, perbandingan antarkorpus, dan penyusunan penjelasan. Pada tahap pertama, seluruh dokumen dibaca berulang untuk memahami konteks, struktur argumen, dan pola leksikal. Selanjutnya, segmen teks diberi satu atau lebih kode, antara lain ancaman terorisme, bahaya nuklir, agresi, kedaulatan, pembelaan diri, tekanan ekonomi, hak nuklir, perdamaian bersyarat, dan rujukan hukum. Kode kemudian dikaitkan dengan perangkat analisis wacana berupa representasi aktor, polarisasi “kami dan mereka”, modalitas, presuposisi, penghilangan agen, serta strategi legitimasi. Pada tahap berikutnya, kode dikelompokkan menjadi tema, ditinjau ulang, lalu dibandingkan antara korpus Amerika Serikat dan Iran secara sinkronis dan diakronis. Frekuensi kemunculan tema hanya digunakan sebagai indikator keterulangan, bukan sebagai pengujian statistik. Interpretasi akhir menghubungkan pola bahasa dengan konteks



peristiwa dan literatur terkait melalui analisis tematik reflektif (Naeem et al., 2023). Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber institusional, pemeriksaan kasus negatif, pencocokan kutipan dengan teks asli, memo reflektif, buku kode, dan *audit trail* (Saldana, 2025).

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Temuan pertama menunjukkan konsistensi wacana Amerika Serikat dalam menempatkan Iran sebagai sumber ancaman keamanan. Dari sepuluh dokumen Amerika Serikat, bingkai ancaman atau terorisme terdapat pada sepuluh dokumen, isu nuklir dan nonproliferasi pada delapan dokumen, pembelaan atau perlindungan pada enam dokumen, perdamaian bersyarat pada enam dokumen, kekuatan dan kepemimpinan tegas pada enam dokumen, serta tekanan ekonomi pada lima dokumen. Dokumen Januari 2020 menyebut tindakan terhadap Soleimani sebagai upaya menghentikan perang dan melindungi warga Amerika. Pernyataan sanksi 2020 dan 2024 menghubungkan sektor minyak, rudal, jaringan proksi, serta pembiayaan terorisme dalam satu rangkaian ancaman. Lembar fakta Februari 2025 menggunakan istilah "*maximum pressure*", sedangkan komunikasi Juni 2025 dan April 2026 menggabungkan frasa "*peace through strength*" dengan klaim keberhasilan operasi. Dalam beberapa teks, rakyat Iran dipisahkan dari pemerintah Iran: pemerintah dijadikan sasaran ancaman, sementara rakyat disebut layak memperoleh masa depan yang lebih baik. Tindakan Amerika Serikat paling sering dinyatakan melalui kata kerja aktif seperti *protect*, *prevent*, *stop*, *restore*, *deny*, *dismantle*, dan *defend*, sedangkan tindakan Iran dikaitkan dengan *threaten*, *sponsor*, *destabilize*, *attack*, dan *pursue*.

Data tersebut memperlihatkan susunan pesan yang berulang. Bagian awal dokumen Amerika Serikat umumnya menyebut tindakan atau kemampuan Iran yang dinilai berbahaya, kemudian menjelaskan respons Amerika Serikat, dan ditutup dengan tujuan keamanan atau perdamaian. Ancaman regional, program nuklir, rudal, dan kelompok bersenjata sering ditempatkan dalam daftar yang sama sehingga membentuk gambaran ancaman yang luas. Sanksi dijelaskan sebagai pembatasan sumber daya pemerintah Iran, bukan sebagai tindakan terhadap masyarakat. Operasi militer dijelaskan sebagai tindakan terarah, defensif, atau pencegahan. Ketika negosiasi disebut, pembicaraan ditempatkan setelah tuntutan agar Iran mengubah perilaku, menghentikan program tertentu, atau menerima persyaratan verifikasi. Dokumen juga menggunakan modalitas tinggi, antara lain *will not allow*, *must never obtain*, *will hold accountable*, dan *remains committed*. Hanya sedikit kalimat yang menyebut ketidakpastian atau kemungkinan kesalahan perhitungan. Rujukan pada hukum hadir melalui hak pembelaan diri, perlindungan warga negara, implementasi sanksi, dan kewajiban nonproliferasi. Dalam seluruh korpus Amerika Serikat,



tidak ditemukan pengakuan eksplisit bahwa tekanan ekonomi atau penggunaan kekuatan Amerika Serikat menjadi penyebab utama tindakan balasan Iran sebab eskalasi lebih sering ditempatkan pada keputusan pemerintah Iran.

Tiga pola utama merangkum temuan pertama. Pertama, terdapat penggabungan ancaman: isu nuklir, terorisme, rudal, minyak, dan proksi disusun sebagai satu ekosistem keamanan, walaupun masing-masing memiliki rezim hukum dan konteks berbeda. Kedua, terdapat pemisahan moral antara pemerintah dan rakyat Iran. Pemerintah digambarkan agresif atau represif, sedangkan rakyat Iran disebut sebagai pihak yang dapat memperoleh manfaat apabila kebijakan pemerintah berubah. Ketiga, tindakan koersif Amerika Serikat diberi urutan tujuan yang positif, yaitu perlindungan, pencegahan, stabilitas, kemudian perdamaian. Pola keempat ialah ketergantungan pada modalitas absolut dan temporal, ancaman dikatakan harus dihentikan sekarang agar bahaya yang lebih besar tidak terjadi kemudian. Dalam distribusi waktu, istilah sanksi dan tekanan paling jelas pada dokumen 2020, 2024, dan Februari 2025 istilah operasi, penghancuran kemampuan, dan gencatan senjata menguat pada 2025–2026. Meskipun topik berubah, posisi aktor tetap stabil, Amerika Serikat tampil sebagai pengelola keamanan yang bertindak, Iran sebagai objek yang harus dibatasi, dan sekutu kawasan sebagai pihak yang perlu dilindungi. Tidak ada dokumen yang menempatkan kedua negara sebagai pihak dengan tingkat tanggung jawab eskalasi yang setara.

Tabel 2. Bingkai Dominan dalam Dokumen Resmi

Korpus	Bingkai	Dokumen (n)	Bentuk Penyajian
Amerika Serikat	Ancaman/terorisme	10	Iran diposisikan sebagai sumber bahaya
Amerika Serikat	Nuklir/nonproliferasi	8	Program nuklir dikaitkan dengan risiko keamanan
Amerika Serikat	Pembelaan/perlindungan	6	Tindakan sendiri disebut defensif atau preventif
Amerika Serikat	Perdamaian bersyarat	6	Dialog mengikuti perubahan perilaku Iran
Amerika Serikat	Tekanan ekonomi	5	Sanksi sebagai pembatas sumber daya pemerintah
Iran	Agresi/terorisme Amerika Serikat	10	Tekanan dan serangan ditempatkan sebagai pemicu



Korpus	Bingkai	Dokumen (n)	Bentuk Penyajian
Iran	Unilateralitas/standar ganda	9	Kebijakan Amerika Serikat dinilai selektif
Iran	Kedaulatan/hukum internasional	9	Legalitas menjadi dasar utama klaim
Iran	Perlawanan/pembelaan diri	7	Respons diposisikan sebagai tindakan reaktif
Iran	Hak nuklir damai	6	Teknologi nuklir dipisahkan dari senjata

Catatan: Satu dokumen dapat memuat lebih dari satu bingkai; frekuensi bersifat deskriptif.

Temuan kedua menunjukkan pola kebalikan dalam korpus Iran. Dari sepuluh dokumen, bingkai agresi atau terorisme Amerika Serikat muncul pada sepuluh dokumen, unilateralitas dan standar ganda pada sembilan dokumen, kedaulatan serta hukum internasional pada sembilan dokumen, perlawanan atau pembelaan diri pada tujuh dokumen, hak atas program nuklir damai pada enam dokumen, dan korban, kemartiran, atau solidaritas pada empat dokumen. Pernyataan 3 Januari 2020 menyebut pembunuhan Soleimani sebagai *terrorist assassination* dan menjanjikan konsekuensi. Pesan Maret 2020 mengaitkan sanksi Amerika Serikat dengan hambatan kemanusiaan pada masa pandemi. Pidato di Dewan Keamanan dan pernyataan mengenai JCPOA menempatkan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan sebagai titik pelanggaran awal. Dokumen 2024–2025 menggunakan frasa *unjust resolution*, *peaceful nuclear program*, dan *inalienable rights*, sedangkan pernyataan Juni 2026 menyebut *continued violation* atau *flagrant violation* terhadap gencatan senjata. Kata kerja yang dilekatkan pada Amerika Serikat meliputi *violate*, *impose*, *threaten*, *assassinate*, *obstruct*, *attack*, dan *politicize*. Iran lebih sering dikaitkan dengan *defend*, *resist*, *cooperate*, *negotiate*, *fulfill*, dan *reserve the right*.

Rangkaian pesan Iran umumnya dimulai dengan peristiwa atau keputusan eksternal, dilanjutkan penjelasan mengenai pelanggaran hukum atau komitmen, kemudian diakhiri dengan hak Iran untuk merespons. Amerika Serikat ditempatkan sebagai aktor aktif yang memulai tekanan, sementara tindakan Iran dipresentasikan sebagai reaksi terhadap sanksi, serangan, atau kegagalan pihak lain memenuhi kewajiban. Dokumen nuklir membedakan antara senjata nuklir dan program nuklir damai, penolakan terhadap senjata disandingkan dengan penegasan hak pengayaan, penelitian, atau penggunaan teknologi nuklir. Dalam teks tentang negosiasi, Iran menyatakan tidak menolak diplomasi, tetapi menuntut itikad baik, penghormatan, dan penghapusan ancaman. Modalitas tinggi tampak pada frasa *will*



never surrender, cannot be deprived, must be held accountable, dan reserves its legitimate right. Rujukan hukum lebih beragam daripada korpus Amerika Serikat, meliputi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi Dewan Keamanan, JCPOA, hukum humaniter, kedaulatan, dan nonintervensi. Dokumen yang membahas rakyat Amerika cenderung memisahkan mereka dari kebijakan pemerintah, terutama ketika menyerukan penolakan terhadap sanksi. Tidak ditemukan pernyataan yang mengakui kebijakan regional atau nuklir Iran sebagai penyebab sah kekhawatiran keamanan Amerika Serikat.

Empat pola merangkum temuan kedua. Pertama, tindakan Iran ditempatkan dalam urutan kronologis respons ada pelanggaran, kemudian muncul kewajiban membela diri, mempertahankan hak, atau membalas. Kedua, legalitas menjadi sumber utama legitimasi melalui penyebutan perjanjian, resolusi, dan prinsip kedaulatan. Ketiga, identitas nasional dibangun melalui ketahanan terhadap tekanan, kata *resistance, dignity, independence, dan sovereignty* muncul bersama tuntutan agar hubungan berlangsung tanpa ancaman. Keempat, program nuklir dikonstruksi secara konsisten sebagai hak ilmiah dan pembangunan, sedangkan kecurigaan terhadapnya disebut produk politisasi atau standar ganda. Distribusi waktu memperlihatkan pergeseran dari bahasa duka, kemartiran, dan solidaritas pada 2020 menuju bahasa legal-institusional dalam dokumen JCPOA dan IAEA 2024–2025. Pada 2026, bahasa kembali termiliterisasi melalui tuduhan pelanggaran gencatan senjata dan penegasan hak respons. Posisi aktor tetap, Iran tampil sebagai negara berdaulat yang menanggung tekanan tetapi bersedia bekerja sama, Amerika Serikat sebagai pemrakarsa tekanan, dan lembaga internasional sebagai arena yang dapat menegakkan hukum atau menjadi instrumen politik. Tanggung jawab eskalasi tidak pernah dibagi secara simetris.

Temuan ketiga memperlihatkan persamaan struktur antara dua korpus meskipun isi penilaiannya berlawanan. Sebanyak sembilan belas dari dua puluh dokumen membentuk oposisi moral yang jelas antara pihak yang melindungi dan pihak yang mengancam. Delapan belas dokumen menggunakan modalitas tinggi untuk menyatakan kepastian, kewajiban, atau ketidakterimaan. Enam belas dokumen menghubungkan tindakan sendiri dengan perdamaian, keamanan, hukum, atau perlindungan masyarakat. Lima belas dokumen memisahkan rakyat negara lawan dari pemerintahnya, sedangkan empat belas dokumen mengutip atau merujuk lembaga hukum dan keamanan internasional. Dalam korpus Amerika Serikat, ancaman paling sering berfungsi sebagai premis awal, dalam korpus Iran, pelanggaran menjadi premis awal. Keduanya kemudian bergerak menuju kesimpulan serupa: tindakan sendiri diperlukan dan lawan harus mengubah perilaku. Penghilangan agen juga ditemukan. Dampak kemanusiaan sanksi jarang dijelaskan dalam teks Amerika Serikat, sedangkan keterlibatan Iran dengan kelompok bersenjata regional jarang dijelaskan dalam teks Iran. Pada teks 2026, kedua pihak menggunakan penamaan



operasi, pelanggaran, keberhasilan, dan gencatan senjata untuk menetapkan urutan peristiwa yang berbeda. Setiap versi memberi titik awal yang menguntungkan posisi pembicara.

Perbandingan bentuk bahasa menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada sumber otoritas yang paling sering dipakai. Dokumen Amerika Serikat lebih banyak menggunakan otoritas kemampuan, efektivitas, dan kepemimpinan, terlihat pada kata *decisive*, *strength*, *maximum*, *dismantle*, dan *restore*. Dokumen Iran lebih banyak menggunakan otoritas hukum, sejarah, dan ketahanan, terlihat pada kata *illegal*, *unilateral*, *sovereignty*, *rights*, *resistance*, dan *dignity*. Namun, kedua korpus memakai strategi yang sama untuk mengelola kontradiksi. Pernyataan tentang perdamaian ditempatkan berdekatan dengan ancaman konsekuensi, keterbukaan terhadap diplomasi disertai syarat yang harus dipenuhi lawan, penghormatan terhadap rakyat lawan disandingkan dengan tindakan yang menekan pemerintahnya. Pernyataan juga menggunakan angka, nama lembaga, istilah teknis, dan urutan kronologis untuk menghasilkan kesan faktual. Pada saat yang sama, kata sifat evaluatif seperti *dangerous*, *brutal*, *unjust*, *blatant*, *historic*, dan *legitimate* memberi arah moral terhadap fakta tersebut. Tidak ada dokumen yang sepenuhnya menggunakan bahasa netral. Bahkan pernyataan teknis mengenai sanksi, pengayaan, atau resolusi tetap memilih subjek, sebab, dan konsekuensi yang mendukung posisi institusional penerbit.

Kesimpulan umum hasil penelitian menghasilkan tiga kecenderungan. Pertama, komunikasi resmi kedua negara membentuk “legitimasi cermin”: struktur pembelaan diri, perlindungan rakyat, penghormatan hukum, dan tujuan perdamaian dipakai oleh kedua pihak untuk membenarkan kebijakan yang saling ditolak. Kedua, terdapat perubahan kosakata tanpa perubahan posisi dasar. Bahasa pada 2020 banyak berpusat pada individu, pembunuhan, pembalasan, dan sanksi; pada 2024–2025 bahasa menjadi lebih institusional melalui JCPOA, IAEA, resolusi, minyak, dan negosiasi pada 2026 bahasa kembali berpusat pada operasi, kemampuan militer, pelanggaran, dan gencatan senjata. Ketiga, setiap pihak mengurangi visibilitas tindakan sendiri yang dapat dibaca sebagai pemicu konflik. Amerika Serikat mengurangi pembahasan dampak sanksi dan perubahan rezim keamanan akibat serangan, sedangkan Iran mengurangi pembahasan kekhawatiran terhadap pengayaan, rudal, dan aktor regional. Akibatnya, pembaca menerima dua kronologi yang tidak bertemu pada titik awal yang sama. Data tidak menunjukkan hilangnya diplomasi, karena kedua pihak tetap menggunakan istilah dialog dan perdamaian. Akan tetapi, diplomasi selalu ditempatkan di dalam kerangka moral yang menuntut perubahan terlebih dahulu dari pihak lawan.



Tabel 3. Strategi Diskursif Lintas Korpus

Strategi	Penanda Leksikal/Struktural	Fungsi Komunikatif
Representasi aktor	pelindung, ancaman, agresor, korban, rakyat	Menetapkan identitas dan tanggung jawab
Polarisasi moral	kami/mereka, legal/ilegal, damai/agresif	Menyszerhanakan konflik menjadi oposisi
Modalitas tinggi	must, will, never, cannot, legitimate	Menciptakan kepastian dan kewajiban
Legitimasi tujuan	peace, security, protection, sovereignty	Menghubungkan tindakan dengan nilai positif
Penghilangan konteks	dampak sanksi, kekhawatiran nuklir/proksi	Mengurangi visibilitas kontribusi diri
Kronologi selektif	titik awal berbeda untuk eskalasi	Menentukan siapa yang dianggap memulai

Sumber: Hasil pengodean korpus penelitian (2026).

Discussion

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana dokumen resmi Amerika Serikat dan Iran memproduksi ideologi serta legitimasi selama konflik 2020–2026. Tiga temuan utama dapat ditegaskan. Pertama, Amerika Serikat mengorganisasi wacana melalui bingkai ancaman. Iran disatukan dengan terorisme, bahaya nuklir, proksi, dan ketidakstabilan, sementara sanksi atau operasi militer diletakkan sebagai tindakan perlindungan. Kedua, Iran mengorganisasi wacana melalui bingkai pelanggaran. Amerika Serikat ditempatkan sebagai agresor unilateral, sedangkan respons Iran dikonstruksi sebagai pembelaan kedaulatan, hukum, dan hak nuklir damai. Ketiga, kedua pihak memakai struktur legitimasi yang sebanding pembelaan diri, perlindungan rakyat, legalitas, dan perdamaian untuk menghasilkan kesimpulan yang bertentangan. Perubahan periode terutama terlihat pada kosakata: dari pembunuhan dan sanksi pada 2020, menuju bahasa institusional nuklir pada 2024–2025, lalu bahasa operasi dan gencatan senjata pada 2026. Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan dua sistem komunikasi yang sepenuhnya berbeda. Yang ditemukan adalah dua konfigurasi “legitimasi cermin” yang sama-sama menutup kontribusi diri terhadap eskalasi, tetapi menampilkan tindakan lawan sebagai penyebab yang mendahului seluruh respons.

Pola tersebut muncul karena konflik berlangsung dalam kondisi ketidakpercayaan yang mengubah setiap pesan menjadi bagian dari persaingan keamanan. Amerika Serikat memiliki kapasitas material, jaringan aliansi, rezim sanksi, dan akses media global yang



lebih besar; karena itu, legitimasinya menonjolkan kemampuan mengendalikan ancaman serta efektivitas tindakan. Iran menghadapi tekanan ekonomi dan stigmatisasi internasional. Karena itu, legitimasinya menonjolkan legalitas, ketahanan, martabat, dan status sebagai pihak yang menanggung agresi. Hubungan ini menjelaskan mengapa tindakan yang sama memperoleh nama berbeda. Serangan dapat disebut pencegahan oleh pelaku dan agresi oleh sasaran pengayaan dapat disebut hak pembangunan oleh Iran dan jalur menuju ancaman oleh Amerika Serikat. Komunikasi kemudian mengunci dilema keamanan: semakin tegas satu pihak mengumumkan kemampuan dan niatnya, semakin mudah pihak lain membacanya sebagai bukti ancaman. Temuan ini sejalan dengan analisis strategi nuklir Iran yang menekankan dorongan keamanan dan pencegahan, serta kajian serangan preventif yang memperlihatkan hubungan antara risiko, kredibilitas, dan eskalasi (Eisenstadt, 2025; Eslami, 2024). Bahasa tidak menciptakan seluruh konflik, tetapi mengatur cara tindakan material dipahami dan direspons.

Hasil penelitian mendukung studi Norton & Cooley (2025) yang menemukan bahwa narasi media Amerika dan Iran mengenai JCPOA membangun tanggung jawab dan identitas secara berbeda. Temuan juga memperluas Alibigloo & Alipoor (2025), karena polarisasi tidak hanya hadir dalam media berita, tetapi telah dibentuk lebih dahulu oleh teks institusional yang menyediakan kategori ancaman, korban, dan legalitas. Pada isu sanksi, hasil ini selaras dengan Altiparmak & Thies (2026) yang menunjukkan unsur retributif dan emosional di balik kebijakan yang sering dipresentasikan sebagai alat rasional. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa emosi tersebut tidak selalu tampil sebagai perasaan terbuka ia dapat disembunyikan dalam istilah teknis, daftar entitas, atau klaim kepastian. Temuan tentang stigma dan resistensi juga mendukung Pesaran (2026) serta Dinler (2026), yang menjelaskan respons Iran terhadap status outsider dan penggunaan kekuatan simbolik. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan simetri terbatas: Amerika Serikat pun membangun identitas moral melalui pemisahan antara pemerintah dan rakyat Iran. Dibanding studi Twitter Iran (Kermani, 2025; Kermani et al., 2023), korpus resmi lebih terkontrol, tetapi menggunakan mekanisme polarisasi dan pengulangan yang serupa.

Makna teoretis temuan terletak pada hubungan antara representasi dan dominasi. Kekuasaan bekerja ketika satu pihak mampu menjadikan klasifikasinya seperti teroris, agresor, ancaman nuklir, negara berdaulat, atau korban sampai sebagai kosakata awal bagi perdebatan. Klasifikasi tersebut mengarahkan pertanyaan yang dianggap relevan. Jika Iran terlebih dahulu didefinisikan sebagai ancaman, pembahasan bergerak menuju cara membatasi kemampuannya; jika Amerika Serikat terlebih dahulu didefinisikan sebagai agresor, pembahasan bergerak menuju hak perlawanan. Konsep “legitimasi cermin” memperlihatkan bahwa dominasi tidak selalu membutuhkan perbedaan bentuk



argumentasi. Dua aktor dapat memakai nilai universal yang sama sambil menolak penerapannya pada pihak lain. Pola ini menyerupai temuan analisis wacana tentang narasi keamanan dan representasi negara yang menunjukkan pentingnya oposisi diri-positif dan pihak-lain-negatif (Aksar et al., 2025). Pada kasus Iran, politik stigma juga menghasilkan kontra-stigma serta klasifikasi eksternal dijawab dengan bahasa martabat, kedaulatan, dan standar ganda (Dinler, 2026). Dengan demikian, ideologi tidak hanya berupa doktrin eksplisit, tetapi kebiasaan memilih titik awal, aktor, dan akibat yang membuat satu penjelasan tampak wajar.

Secara reflektif, temuan mempunyai manfaat sekaligus batas normatif. Manfaatnya adalah menyediakan indikator untuk membaca komunikasi konflik: perlu ditanyakan siapa yang dihilangkan, peristiwa mana yang dijadikan awal, kerugian siapa yang dihitung, dan syarat perdamaian dibebankan kepada siapa. Indikator tersebut membantu jurnalis dan publik memisahkan informasi faktual dari penilaian moral yang melekat dalam satu kalimat. Bagi kajian kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa tekanan dan diplomasi tidak hanya berinteraksi secara material, tetapi juga secara simbolik. Sanksi yang dipresentasikan sebagai perlindungan dapat dibaca sebagai penghukuman kolektif, sementara ketahanan yang dipresentasikan sebagai kedaulatan dapat menutupi dampak kebijakan terhadap masyarakat sendiri. Perspektif gender dan ekonomi politik mengingatkan bahwa biaya konflik tidak tersebar secara merata (Moghadam, 2024). Keterbatasan normatif penelitian adalah bahwa simetri struktur bahasa tidak berarti simetri kapasitas material, tanggung jawab hukum, atau dampak kemanusiaan. Karena itu, konsep legitimasi cermin tidak boleh digunakan untuk menyamakan seluruh tindakan. Ia berfungsi untuk mengungkap mekanisme komunikasi, sedangkan penilaian hukum dan empiris tetap memerlukan bukti tambahan.

Implikasi praktis penelitian dapat dirumuskan dalam empat tindakan. Pertama, lembaga diplomatik perlu menyertakan kronologi yang dapat diverifikasi, dasar hukum spesifik, dan pemisahan yang jelas antara fakta, inferensi, serta prediksi. Kedua, pernyataan mengenai perdamaian sebaiknya tidak langsung disertai bahasa penghinaan atau ancaman absolut karena kombinasi itu melemahkan kredibilitas pesan deeskalasi. Ketiga, media dan lembaga pendidikan dapat menggunakan matriks analisis aktor-tindakan sebab-akibat untuk membandingkan dua sumber resmi sebelum menyusun berita atau bahan ajar. Keempat, mediator perlu menciptakan format komunikasi yang mengakui kekhawatiran keamanan timbal balik tanpa terlebih dahulu menuntut pengakuan moral sepihak. Secara operasional, setiap pernyataan gencatan senjata dapat memuat waktu kejadian, mekanisme verifikasi independen, prosedur pengaduan, dan kosakata yang telah disepakati. Komunikasi publik juga perlu menghindari penggabungan seluruh isu nuklir, terorisme, minyak, dan proksi ke dalam satu label ancaman, karena setiap isu memiliki jalur negosiasi



berbeda. Rencana tindakan ini tidak menghilangkan konflik kepentingan, tetapi dapat mengurangi ruang bagi klaim absolut dan membantu mengubah komunikasi dari instrumen mobilisasi menuju infrastruktur verifikasi serta pengelolaan konflik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan kesimpulan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi dalam konflik Amerika Serikat-Iran tidak berada di luar kekuasaan, komunikasi merupakan salah satu cara kekuasaan dijalankan. Amerika Serikat membentuk legitimasi dengan menjadikan ancaman sebagai titik awal, lalu menempatkan tekanan dan kekuatan sebagai perlindungan. Iran membentuk legitimasi dengan menjadikan pelanggaran sebagai titik awal, lalu menempatkan perlawanan dan program nuklir sebagai hak kedaulatan. Keduanya menyatakan tujuan perdamaian, membedakan rakyat dari pemerintah lawan, merujuk hukum, dan menggunakan modalitas tinggi. Kesamaan struktur itu menghasilkan "legitimasi cermin": nilai yang sama dipakai untuk membenarkan tindakan sendiri dan menolak tindakan pihak lain. Hikmahnya, pembacaan kritis tidak cukup menanyakan apakah suatu pernyataan benar secara tekstual, tetapi juga harus menanyakan konteks apa yang dihilangkan, urutan sebab apa yang dipilih, serta siapa yang memperoleh hak mendefinisikan ancaman. Perdamaian komunikatif memerlukan lebih dari pergantian slogan. Ia membutuhkan kronologi bersama, mekanisme verifikasi, pengakuan atas kerentanan timbal balik, dan kesediaan memisahkan fakta dari evaluasi moral. Tanpa itu, diplomasi mudah berubah menjadi kelanjutan dominasi dengan bahasa yang lebih halus.

Kekuatan penelitian terletak pada penggunaan korpus seimbang, rentang waktu longitudinal, dan integrasi analisis mikro kebahasaan dengan konteks kebijakan. Dua puluh dokumen resmi memungkinkan perbandingan langsung antara cara Amerika Serikat dan Iran menamai aktor, membangun kausalitas, menggunakan modalitas, serta merujuk hukum. Pemisahan hasil dari pembahasan menjaga agar pola deskriptif dapat diperiksa sebelum dihubungkan dengan teori. Secara keilmuan, penelitian menyumbangkan konsep legitimasi cermin untuk menjelaskan bagaimana aktor yang bermusuhan menggunakan struktur moral serupa dalam membenarkan tindakan yang berlawanan. Konsep ini dapat diterapkan pada konflik lain dengan memperhatikan perbedaan kapasitas material dan kedudukan hukum. Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan dari bahasa sanksi ke bahasa operasi tidak menghapus pola dasar representasi; yang berubah terutama adalah intensitas dan medan kosakatanya. Secara metodologis, matriks aktor-tindakan-legalitas-tujuan menawarkan alat yang dapat direplikasi untuk dokumen diplomatik. Secara praktis, temuan memberi dasar bagi literasi media, evaluasi pernyataan resmi, dan desain komunikasi deeskalasi. Kontribusi tersebut mempertemukan kajian komunikasi politik,



hubungan internasional, serta analisis wacana kritis dalam satu penjelasan yang berorientasi pada data.

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Korpus dibatasi pada dua puluh dokumen berbahasa Inggris yang tersedia di laman resmi, sehingga tidak mencakup seluruh pernyataan dalam bahasa Persia, konferensi pers, wawancara, media sosial, komunikasi militer, atau dokumen rahasia. Analisis berfokus pada produksi pesan dan tidak mengukur penerimaan audiens, perubahan opini publik, maupun efek langsung terhadap keputusan kebijakan. Frekuensi tema dihitung pada tingkat dokumen dan digunakan sebagai penunjuk keterulangan, bukan pengujian statistik. Penelitian juga tidak melakukan penilaian hukum independen terhadap setiap serangan, sanksi, atau klaim gencatan senjata. Studi lanjutan perlu memperluas korpus secara multibahasa, membandingkan terjemahan resmi dengan teks asli, serta menggabungkan analisis wacana dengan wawancara diplomat, jurnalis, dan masyarakat terdampak. Penelitian kuantitatif dapat menguji hubungan antara intensitas bahasa ancaman dan perubahan dukungan publik, sedangkan studi komputasional dapat memetakan penyebaran slogan resmi ke media serta platform digital. Perbandingan dengan konflik negara lain juga diperlukan untuk menilai apakah legitimasi cermin merupakan pola umum atau karakter khusus hubungan Amerika Serikat-Iran. Dengan langkah tersebut, penjelasan tentang komunikasi, ideologi, dan dominasi dapat menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdi, A. (2025). A feminist international political economy of sanctions: crises and the shifting gendered regimes of labor and survival in Iran. *International Feminist Journal of Politics*, 27(1), 81-104. <https://doi.org/10.1080/14616742.2025.2454462>
2. Akdoğan, İ., & Adıgüzel, Y. (2022). A Strategic Narrative Construction of the Trump Administration on Iran's Nuclear Program. *Siyasal: Journal of Political Sciences*, 31(2), 195-216. <https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1067268>
3. Aksar, I. A., Imran, M. A., Gong, J., & Baloch, H. U. R. (2025). Reframing the Taliban: A critical discourse analysis of media narratives in Pakistan, China and the United States. *Media, War & Conflict*. <https://doi.org/10.1177/17506352251355506>
4. Alibigloo, H. P., & Alipoor, J. (2025). Media representation of Israel-Iran confrontation in CNN and TASS. *Review of Communication*, 25(4), 267-280. <https://doi.org/10.1080/15358593.2025.2540816>
5. Altıparmak, S. O., & Thies, C. G. (2026a). Sanctioning as a goal unto itself: retribution and emotions behind the Iranian sanctions. *Cambridge Review of International Affairs*, 39(1), 124-151. <https://doi.org/10.1080/09557571.2025.2574691>
6. Altıparmak, S. O., & Thies, C. G. (2026b). Sanctioning as a goal unto itself: retribution



- and emotions behind the Iranian sanctions. *Cambridge Review of International Affairs*, 39(1), 124–151. <https://doi.org/10.1080/09557571.2025.2574691>
7. Beidollahkhani, A. (2022a). Discourse Formation of Political Dissents via Twitter: Political Sociology of the Subversion Discourse in the Islamic Republic of Iran. *Sociological Research Online*, 27(4), 1020–1039. <https://doi.org/10.1177/13607804221122462>
 8. Beidollahkhani, A. (2022b). Discourse Formation of Political Dissents via Twitter: Political Sociology of the Subversion Discourse in the Islamic Republic of Iran. *Sociological Research Online*, 27(4), 1020–1039. <https://doi.org/10.1177/13607804221122462>
 9. Cap, P. (2025). Discourses of leadership in the 2015–2023 Poland: From conflict and crisis, to a “smiling state.” *Discourse and Society*, 36(4), 453–473. <https://doi.org/10.1177/09579265241271490>
 10. Dinler, M. (2026a). Shamed but not Ashamed: Iran’s Use of Symbolic Power and Making the World Turn around Stigma. *Global Studies Quarterly*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksag035>
 11. Dinler, M. (2026b). Shamed but not Ashamed: Iran’s Use of Symbolic Power and Making the World Turn around Stigma. *Global Studies Quarterly*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksag035>
 12. Egeland, K. (2021a). The Ideology of Nuclear Order. *New Political Science*, 43(2), 208–230. <https://doi.org/10.1080/07393148.2021.1886772>
 13. Egeland, K. (2021b). The Ideology of Nuclear Order. *New Political Science*, 43(2), 208–230. <https://doi.org/10.1080/07393148.2021.1886772>
 14. Eisenstadt, M. (2025a). The Risk and Reward of Preventive Strikes Against Iran. *Survival*, 67(5), 45–56. <https://doi.org/10.1080/00396338.2025.2561480>
 15. Eisenstadt, M. (2025b). The Risk and Reward of Preventive Strikes Against Iran. *Survival*, 67(5), 45–56. <https://doi.org/10.1080/00396338.2025.2561480>
 16. Eslami, M. (2024a). Exploring the Driving Forces Behind Iran’s Nuclear Deterrence Strategy: A Novel Methodological Approach. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 7(1), 211–235. <https://doi.org/10.1080/25751654.2024.2319381>
 17. Eslami, M. (2024b). Exploring the Driving Forces Behind Iran’s Nuclear Deterrence Strategy: A Novel Methodological Approach. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 7(1), 211–235. <https://doi.org/10.1080/25751654.2024.2319381>
 18. Goulding, S., & Liu, Z. (2025). (De)Legitimizing support: British newspapers’ legitimization strategies during the Battle of Bakhmut. In *Media, War and Conflict*. Media, War & Conflict. <https://doi.org/10.1177/17506352251360954>
 19. Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research:



- A systematic review of empirical tests. *Social Science and Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
20. Kebede, A. T., & Pohjonen, M. (2025). 'Adwa, not AGOA': Digital propaganda and strategic narratives during the Ethiopian civil war of 2020 to 2022. *Media, War and Conflict*. <https://doi.org/10.1177/17506352251403008>
 21. Kermani, H. (2022). Populist discourse and the resulting discontent in hybrid regimes: an examination of Rouhani's rhetoric in the first wave of the COVID-19 pandemic. *Political Research Exchange*, 4(1), 2081585. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2022.2081585>
 22. Kermani, H. (2025). Framing the Pandemic on Persian Twitter: Gauging Networked Frames by Topic Modeling. *American Behavioral Scientist*, 69(10), 1289-1304. <https://doi.org/10.1177/00027642231207078>
 23. Kermani, H., Bayat Makou, A., Tafreshi, A., Mohamad Ghodsi, A., & Ataee, H. (2023). Bots Versus Humans: Discursive Activism During the Pandemic in the Iranian Twittersphere. *Social Media and Society*, 9(4). <https://doi.org/10.1177/20563051231216927>
 24. Kermani, H., & Hooman, N. (2024). Hashtag feminism in a blocked context: The mechanisms of unfolding and disrupting #rape on Persian Twitter. *New Media and Society*, 26(8), 4750-4784. <https://doi.org/10.1177/14614448221128827>
 25. Kermani, H., & Tafreshi, A. (2023). Walking with Bourdieu into Twitter communities: an analysis of networked publics struggling on power in Iranian Twittersphere. *Information Communication and Society*, 26(8), 1653-1674. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.2021267>
 26. Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846-854. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
 27. Moghadam, V. M. (2024). The gendered politics of Iran-U.S. relations: sanctions, the JCPOA and women's security. *Third World Quarterly*, 45(7), 1199-1218. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2314005>
 28. Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1-18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
 29. Norton, K., & Cooley, A. (2025). A comparative analysis of strategic narratives and persuasive language techniques within Iranian and US news media: The study of the joint comprehensive plan of action. *Media, War and Conflict*, 18(1), 82-102. <https://doi.org/10.1177/17506352241249065>
 30. Pesaran, E. (2026). Outside In? Iran's Mixed Responses to International Stigmatization.



Iranian Studies, 59(2), 365–371. <https://doi.org/10.1017/irn.2025.10135>

31. Ranji, B., & Selvik, K. (2026). Emotions in the legitimization of repression: state framing during the Woman, Life, Freedom movement in Iran. *International Political Science Review*, 47(2), 283–298. <https://doi.org/10.1177/01925121251355491>
32. Ravitch, S., & Carl, N. (2021). Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological. In *Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological* (2nd ed.). SAGE.
33. RezaeeDaryakenari, B., Ghafouri, V., & Kasap, N. (2025). Who Rallies Round the Flag? The Impact of the US Sanctions on Iranians' Attitude toward the Government. *Foreign Policy Analysis*, 21(1), 33. <https://doi.org/10.1093/fpa/orae033>
34. Saldana, J. (2025). The Coding Manual for Qualitative Researchers. In *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781036235611>
35. Simon, C., Rees, S., & Thomas, R. (2023). Behind the scenes: A critical discourse analysis of Botswana government power plays on Facebook during two post-millennial state-owned organizational crises. *Public Relations Inquiry*, 12(3), 321–341. <https://doi.org/10.1177/2046147X231200891>
36. Valerio Jovan, C. (2021). the United States Unilateral Withdrawal From the Restrictions of Iran'S Nuclear Program in Jcpoa 2015 Under International Law. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(2), 247–264. <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.414>
37. Ylldlz, E. (2021). Of Nuclear Rials and Golden Shoes: Scaling Commodities and Currencies across Sanctions on Iran. *International Journal of Middle East Studies*, 53(4), 604–619. <https://doi.org/10.1017/S002074382100043X>

